

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, tugas pokok dan fungsi yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan Program sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan RPJMD 2016-2021. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan *good governance*. Program-program dimaksud antara lain (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 16 (enam belas) kegiatan (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17 (tujuh belas) kegiatan (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 (satu) kegiatan (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 (dua) kegiatan (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebanyak 4 (empat) kegiatan dan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 12 (dua belas) kegiatan, jika diakumulasikan jumlah program adalah sebanyak 6 (enam) Program dengan 52 (lima puluh dua) kegiatan

Diharapkan apa yang telah dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barat.

Padang, 26 Januari 2020

**SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT**


H. RAFLIS, SHMM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19640930 198602 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan rensponsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan dan implementasi berbagai kebijakan Pemerintah yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran. Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pelayanan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dimaksud adalah (1). Mendorong Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Tujuan tersebut didukung oleh masing-masing bagian dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Tindak Lanjut dari tujuan yang ingin dicapai dalam memfasilitasi DPRD dan masyarakat pada umumnya maka diperlukan sasaran untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemerintahan. Adapun sasaran dimaksud adalah : 1). Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan. 2). Meningkatkan Tata Kelola Organisasi. Sasaran tersebut di

atas diaplikasikan oleh masing-masing Bagian dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada DPRD dan masyarakat secara umum sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan seluruh Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2018 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD adalah : 1). Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai Institusi yang Kapabel dibidangnya serta untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemamfaatan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2). Mengoptimalkan Ketersediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana serta Pengembangan Kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan penilaian kinerja pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

Padang, 26 Januari 2020

**SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Handwritten mark



H. RAFLIS, SH,MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19640930 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI

BAB I .	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Maksud dan Tujuan	1
	1.2.1. Maksud	1
	1.2.2. Tujuan	1
1.3.	Gambaran Organisasi	2
	1.3.1. Kedudukan	2
	1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
	1.3.3. Struktur Organisasi	3
	1.3.4. Sumber Daya Manusia	5
1.4.	Aspek Strategis Organisasi	6
	a. Keuangan	7
1.5.	Isu-isu Strategis	7
BAB II .	PERENCANAAN KINERJA	11
2.1.	Perencanaan Strategis	11
	2.1.2. Tujuan dan Sasaran	12
	2.1.3. Rencana Kinerja tahunan	14
	2.1.4. Rencana Strategi dan Kebijakan	15
2.2.	Penetapan/Perjanjian Kinerja	15
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1.	Capaian Kinerja Organisasi	17
	3.1.1. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	17
	3.1.2. Hasil Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja per Sasaran Strategis	18
	3.1.3. Hasil Pengukuran Sasaran Strategis pada Target RPJMD tahun 2016-2021	40
	3.1.5. Realisasi Anggaran	40
BAB IV.	PENUTUP	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2019.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj IP Tahun 2019 ini adalah :

1. Dapat diketahuinya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019
2. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2019.
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
4. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.

1.2.2. Tujuan

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP adalah :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.

2. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.3. Gambaran Organisasi

1.3.1. Kedudukan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian salah satu unsur OPD yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah dibidang Pemerintahan Umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian.

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 55 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- Sekretariat DPRD provinsi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD, mempunyai fungsi;
 1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD;
 2. menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi; dan
 3. menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;
 4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD. Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretaris DPRD adalah sebagai berikut:

1. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;
2. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Sekretariat DPRD untuk mendukung kelancaran tugas Sekretariat DPRD;
3. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Sekretariat DPRD;
4. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Sekretariat DPRD;
5. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD;
6. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
7. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Sekretariat DPRD;
8. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

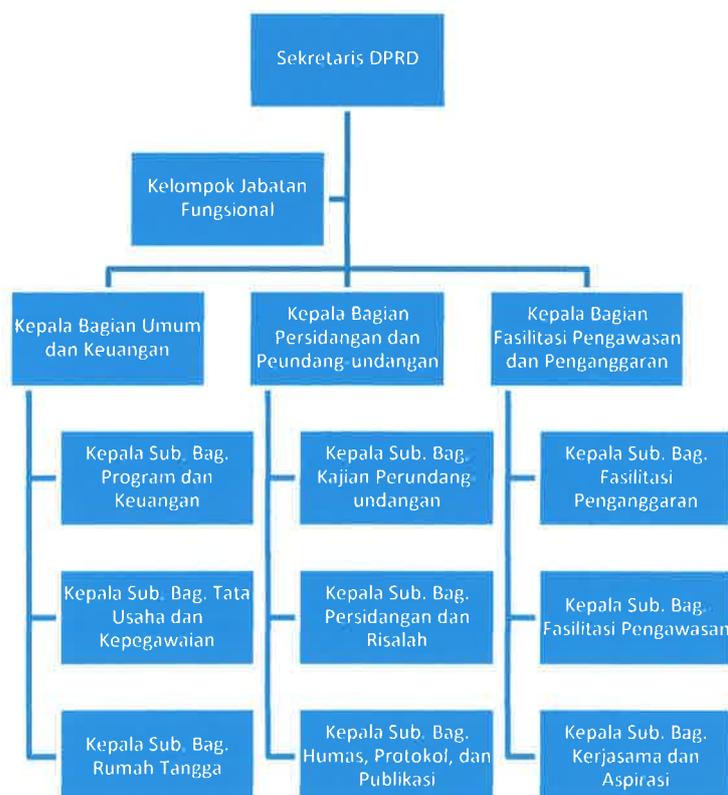
1.3.3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, dan merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tercantum bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat merupakan kategori tipe B. Dengan demikian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Bagian, 9 (sembilan) Sub Bagian dan Kelompok Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mengkoordinasikan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Program dan Keuangan,
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, dan

- Sub Bagian Rumah Tangga.
- b) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah serta humas, protokol dan publikasi, meliputi:
 - Sub Bagian Kajian Perundang-undangan,
 - Sub Persidangan dan Risalah, dan
 - Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- c) Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan terdiri dari :
 - Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran
 - Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan
 - Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Struktur Set. DPRD Provinsi Sumbar

1.3.4. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, sampai kondisi bulan Desember tahun 2019 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 125 orang personil dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Keadaan Personil Menurut Jenjang Pendidikan.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 2	10 orang	Keadaan Desember 2019
2	Strata 1	42 orang	
3	Diploma 3	8 orang	
4	Diploma 1	-	
5	SLTA	40 orang	
6	SLTP	- orang	
7	SD	1 orang	
	J u m l a h	101 orang	

Tabel 1.2 : Keadaan Personil Berdasarkan Golongan ruang dan Eselon

No	Golongan dan Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	10 orang	Keadaan Desember 2019
2	Golongan III	55 orang	
3	Golongan II	35 orang	
4	Golongan I	1 orang	
	J u m l a h	101 orang	

1	Eselon I	-	
2	Eselon II	1 orang	
3	Eselon III	3 orang	
4	Eselon IV	8 orang	
5	Staf	89 orang	
	J u m l a h	101 orang	

Tabel 1.3 : Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata I	3 orang	Keadaan Desember 2019
2	Diploma 3	2 orang	
3	Diploma 1	- orang	
4	SLTA	9 orang	
5	SLTP	- orang	
6	SD	- orang	
	J u m l a h	14 rang	

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Pemerintahan Umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, Tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur

Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah mengamanatkan untuk membangun pemerintahan yang baik (Good Governance) yang ditopang oleh tiga pilar yaitu : Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Hal tersebut merupakan spirit yang diwujudkan dalam rangka mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih sesuai tuntutan reformasi. Diberlakukannya UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah membawa konsekuensi positif kepada peran Sekretariat DPRD Provinsi untuk menjembatani dalam memfasilitasi hubungan kerja antara eksekutif dengan legislatif di daerah dalam hal penganggaran yang berbasis kinerja.

a. Keuangan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2019 mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja tidak langsung	49.558.991.765,00
2	Belanja langsung	94.567.086.838,00
Jumlah		144.126.078.603,00

1.5. Isu-isu Strategis

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threath).

Tabel 1.4
Identifikasi Permasalahan Pelayanan OPD

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	
Gambaran Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	Capaian Indeks	Ketersediaan dukungan anggaran yang cukup memadai	Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD	Kompetensi SDM aparatur sekretariat yang kurang memadai.
			Terjalannya hubungan yang harmonis antara sekretariat dengan DPRD	Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaring asmara secara dinamis dan demokratis	
			Tersedianya Tata tertib / kode etik yang mendukung pelaksanaan tupoksi sekretariat DPRD	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tupoksi	Tingkat kedisiplinan anggota dalam menghadiri sidang / rapat rendah.
				Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD	

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat di atas, maka secara normatif, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain

:

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
- 2) Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD baik di dalam organisasi ataupun dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga social kemasyarakatan lainnya termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- 3) Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD.

- 4) Masih rendahnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- 5) Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan kesekretariatan DPRD untuk mengantisipasi hambatan hambatan eksternal dalam rangka perwujudan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh.
- 6) Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.
- 7) Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
- 8) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
- 9) Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior.
- 10) Peningkatan hubungan yang hamonis dengan DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara dinamis dan demokratis belum terbentuk secara optimal.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan, dan rencana jangka pendek setiap tahun.

Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, tidak terkecuali Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi pemerintah di daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2016-2021). Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi lima tahun ke depan. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahun, dan Rencana Kerja (Renja) jangka pendek setiap tahun.

Rencana Strategis yang disusun menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek tahunan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada tiap-tiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Instansi Pemerintah di daerah. Tahun 2019 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Rencana Startegis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang tepat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang, tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD pada tahun 2016 s/d 2021, adalah :

"1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan"

"2. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi"

Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka sasaran yang ingin dicapai ditetapkan antara lain;

1. Nilai Komponen Indeks Kepuasan kepada Pemangku Kepentingan
2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
3. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/ Kegiatan

Untuk lebih rinci, bisa dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Meningkatnya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	-	-	90	90	90	90
2	Peningkatan Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A	A

			Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	95%	95%	95%	95%	95%	95%
--	--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.1.2. Rencana Kinerja Tahunan

Program Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 disusun atas dasar tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Pada tahun 2019 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 6 (enam) Program dengan 1 (satu) Program pokok yang berkaitan langsung dengan kegiatan DPRD dan 5 (lima) Program penunjang mendukung program pokok yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat ada pada Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah tahun 2016-2021, kemudian disusun dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021, dilanjutkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 berdasarkan Rencana Kerja tahun 2019 disusun Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2019 sampai ditetapkan menjadi APBD Tahun 2019, jadi Program dan Kegiatan tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD semuanya ada dalam Perubahan Rencana Strategis 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2019. Adapun Program Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebanyak 6 (enam) Program yang terdiri dari 1 (satu) Program Pokok dan 5 (lima) Program Pendukung dengan rincian sebagai berikut :

Program Pokok:

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Pendukung:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2.1.3. Rencana Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas dilakukan berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mewujudkan perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintah daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya termasuk LSM,
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD,
3. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang diperlukan,
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya aparatur yang tersedia,
6. Meningkatkan fasilitas pelaksanaan rapat, pembuatan risalah dan mendokumentasikan hasil kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD,
7. Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan Infrastruktur database dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan Informasi melalui IT,
8. Meningkatkan pengembangan fungsi kepastakaan, dengan memaksimalkan aset yang ada,
9. Meningkatkan penyelenggaraan dan mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan yang dilakukan melalui berbagai Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Melakukan Evaluasi dan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan terdahulu yang telah dilakukan, dan mengantisipasi terjadinya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

2. Melakukan Evaluasi terhadap SDM dan pemetaan potensi personil dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana, guna mendukung kelancaran tugas dalam memfasilitasi kegiatan Dewan.
3. Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dan perangkatnya, serta Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik

2.2. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Penetapan/Perjanjian Kinerja merupakan komitmen kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Gubernur selaku Kepala Daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala SKPD. Untuk Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Tahun 2019 tertuang pada Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2017 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan		90
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	a.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	A
		b.	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	100%

Pada Tahun 2019 setelah perubahan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 6 (enam) Program dengan 52 (lima puluh dua) kegiatan.

Adapun dukungan dana/anggaran belanja langsung wajib untuk 6 (enam) Program dengan 52 (lima puluh dua) kegiatan tersebut sebesar **Rp. 94.567.086.838,-** dengan rincian pada tabel berikut ;

Tabel 2.3 : Anggaran Program/Kegiatan Set. DPRD Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran
	BELANJA LANGSUNG	94.567.086.838,00
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.571.622.621,00

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.934.381.700,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.197.800.000,00
3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	2.430.051.649,00
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	411.800.000,00
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	379.479.272,00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	286.495.300,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	781.233.600,00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	112.702.400,00
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.775.000,00
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	64.305.000,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	699.826.400,00
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	3.399.392.000,00
13	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	43.600.000,00
14	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.385.060.000,00
15	Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD	307.720.300,00
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD	-
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.118.009.038,00
1	Pengadaan mebeleur	764.537.920,00
2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	446.700.320,00
3	Pengadaan eralatan Studio Komunikasi dan Informasi	993.881.718,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	105.500.000,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.281.300.000,00
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas	1.124.173.325,00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	426.100.000,00
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler	166.750.000,00
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	38.550.000,00
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	160.000.000,00
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	295.450.000,00
12	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.350.000.000,00
13	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	506.080.000,00

14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess	828.416.255,00
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	243.550.000,00
16	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.195.169.500,00
17	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	191.850.000,00
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.567.050.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.567.050.000,00
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	223.470.000,00
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	162.780.000,00
2	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	60.690.000,00
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.694.330.800,00
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	317.845.000,00
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	546.600.200,00
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	383.257.000,00
4	Pengelolaan , Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD	446.628.600,00
F	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	64.392.604.379,00
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	3.984.517.100,00
2	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah	17.147.632.293,00
3	Pembahasan Rancangan Perda	21.829.169.807,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda	2.215.010.380,00
5	Reses	5.631.680.000,00
6	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	203.694.800,00
7	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	6.325.268.287,00
8	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	6.463.530.300,00
9	Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda	136.273.212,00
10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	387.308.500,00
11	Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat	18.154.200,00
12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	50.365.500,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dan perubahan yang telah ditetapkan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) sasaran strategis. Dari 2 (dua) sasaran strategis dimaksud, ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja dengan target kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat.

Bagi organisasi yang mengemban fungsi pemberian dukungan, seperti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, kepuasan orang yang menerima dukungan merupakan suatu hal yang terpenting. Kepuasan mereka merupakan perbandingan antara pelayanan yang diterima (**perceived service**) dengan pelayanan yang diharapkan (**expected service**). Dalam kaitan ini, pelayanan terbaik (**service quality**) harus menjadi upaya dan perhatian utama, yang sangat tergantung pada tingkat keprofesionalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga menentukan kualitas dukungan sebagai kinerja (**performance**) organisasi.

3.1.1. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja, dapat dilihat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	1	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	88,10
2.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	-*
		2	Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/ Kegiatan	100%	93,04

- :masih menunggu hasil dari Inspektorat*

Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Tahun 2016-2021, pada tahun 2019 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 6 (enam) program yang yaitu:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
BELANJA LANGSUNG				
		94.567.086.838,00	87.983.324.499,13	93,04
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.571.622.621,00	14.010.517.610,57	96,15
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.118.009.038,00	10.505.168.512,56	86,69
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.567.050.000,00	1.560.857.500,00	99,60
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	223.470.000,00	174.879.129,00	78,26
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.694.330.800,00	1.674.509.741,00	98,83
VI	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	64.392.604.379,00	60.057.392.006,00	93,27

3.1.2. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metode pengukuran kualitas kinerja Sekretariat DPRD Prov. Sumatera Barat, dilakukan survei tingkat kepuasan atas pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada pengguna (*user*), yaitu Anggota DPRD Sumatera Barat pada akhir tahun 2019 dan masyarakat/OPD sebagai pemangku kepentingan Sekretariat DPRD serta mitra kerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk porsi perhitungan adalah 80% untuk hasil pengukuran anggota DPRD dan 20% untuk hasil pengukuran pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan survei ini merupakan amanat Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2016-2019 yang di dalamnya telah ditetapkan indikator-indikator kinerja program, salah satunya adalah kepuasan pengguna layanan (pemangku kepentingan).

3.1.3. Hasil Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Kinerja Per Sasaran Strategis

A. Sasaran Strategis 1

1. Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan, Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

Sasaran 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat yaitu "Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan" dengan indikator kinerja "Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan"

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 1 terlihat pada tabel di bawah ini:

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	1.1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	88,10	97,88 %

Berdasarkan tabel di atas, analisa capaian indikator kinerja sasaran 1 yaitu Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dengan skor 88,10 dengan target kinerja pada skor 90. Persentase ketercapaian adalah 97,88%.

a. Survei Anggota DPRD

Survei untuk anggota DPRD dilaksanakan pada akhir tahun 2019, dengan anggapan seluruh Anggota DPRD memahami bentuk-bentuk pelayanan yang ada pada Sekretariat DPRD. Survei dilakukan dalam bentuk pengisian kuesioner yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai pelayanan oleh Sekretariat DPRD. Selain itu, kuesioner juga dilengkapi dengan isian saran-saran dari anggota DPRD dengan harapan bisa menjadi salah satu bahan analisa untuk perbaikan Pelayanan Sekretariat DPRD ke depannya.

Survei kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam jenis riset kuantitatif yang mengandalkan perolehan data pada kuesioner. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif atau data yang diberi kode angka berdasarkan skala ordinal dan interval

sehingga dapat dianalisis menggunakan perhitungan matematik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini adalah dengan menyebar kuesioner ke seluruh anggota DPRD untuk memperoleh data kuantitatif tentang gejala yang ingin diketahui.

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner *selfreport*. Kuesioner adalah dokumen tertulis yang terdiri dari seperangkat pertanyaan, diberikan kepada responden untuk memberikan pertanyaan dan mencatat jawaban (*selfreport*). Melalui *self-report* partisipan diminta untuk memberikan respons yang sesuai dengan pengalaman dan keadaan dirinya. Partisipan diberikan sejumlah pertanyaan yang sama untuk kemudian jawabannya dikumpulkan dan dianalisis.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian sebagai berikut :

Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis I dan Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	86 - 100	Sangat Puas
2	70 - 85	Puas
3	50 - 69	Kurang Puas
4	36 - 50	Tidak Puas
5	<34	Sangat Tidak Puas

Survei dilakukan kepada Anggota DPRD untuk mengetahui persepsi Anggota DPRD terhadap kualitas dukungan Sekretariat DPRD. Survei kepuasan pengguna dilakukan oleh Sekretariat DPRD pada minggu pertama hingga minggu ketiga bulan Januari 2020. Pertimbangan pelaksanaan survei tersebut adalah karena sebagian besar anggota DPRD periode 2019-2024 merupakan wajah baru, sehingga anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang baru juga bisa memberikan respon terhadap pelayanan awal tahun oleh Sekretariat DPRD

Bentuk layanan yang dinilai meliputi layanan yang diberikan oleh seluruh unit kerja yang ada di Sekretariat DPRD yang berkaitan langsung dengan Anggota DPR RI, baik itu layanan administrasi, maupun layanan teknis.

Jumlah responden mencakup 50 orang, yang mencakup responden dari 10 Fraksi di DPR RI dengan total populasi 65 orang. Jumlah responden ini diambil dengan rumus Krietje dan Morgan, dengan derajat kepercayaan = 97%, *margin of error* = 4,8%, maka sampel yang diambil adalah sebesar 50 responden.

Adapun hasil kuesioner survei tersebut adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Kuesioner						
Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD Sumatera Barat						
Dukungan Sumber Daya Manusia						
No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
1.	Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	22	27	1		
2.	Inisiatif, komunikasi, dan kerja sama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	26	23	1		
3.	Kecepatan penyiapan materi rapat, kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)	27	22	1		
4.	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan (skenario rapat untuk pimpinan, laporan singkat, draft kesimpulan)	25	24	1		
5.	Disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja di luar jam kerja	21	28	1		
6.	Pelayanan ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan rapat-rapat, seperti rapat internal komisi, rapat lainnya (selain persidangan)	20	29	1		
Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas						
No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
7.	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas	22	28			
8.	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas	28	21	1		
9.	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan	28	20	2		
10.	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas	20	29	1		
11.	Kenyamanan dalam melaksanakan perjalanan dinas	22	28			

12.	Kecepatan dan kenyamanan untuk kesiapan daerah tujuan (koordinasi dengan daerah/instansi tujuan)	23	26	1		
Penyediaan Sarana dan Prasarana						
No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
13.	Kualitas Ruang Kerja Anggota (kelengkapan sarana dan prasarana)	26	22	2		
14.	Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang Rapat AKD (kelengkapan sarana dan prasarana)	23	25	2		
15.	Kualitas Rumah Jabatan Pimpinan (RJP) (kelengkapan sarana dan prasarana)	26	22	2		
16.	Kualitas sarana pendukung (toilet, taman, dan alat pendingin)	24	25	1		
17.	Keramahan, kecepatan, dan ketelitian petugas dalam merespons keluhan (di lingkungan Gedung DPRD)	29	19	2		
18.	Pelayanan dalam penyiapan konsumsi	29	20	1		
Pelayanan Publik						
No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
19.	Keramahan Petugas Front Office Kantor Sekretariat DPRD	20	29	1		
20.	Kecepatan dalam mempublikasikan kegiatan Kedewanan di media cetak dan online	20	26	4		
21.	Penyediaan Informasi terhadap tamu	22	24	4		
22.	Kecepatan dan Ketepatan pelayanan kepada tamu	22	25	3		
23.	Pelayanan atas penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD	23	25	2		
24.	Penerimaan Aspirasi Masyarakat	27	21	2		
25.	Kecepatan atas tindak lanjut aspirasi masyarakat	28	18	4		
Pelayanan Keuangan						
No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
26.	Ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	19	26	5		
27.	Kepuasan dalam memberikan informasi administrasi keuangan	11	21	18		
28.	Ketepatan waktu dalam hal pembayaran hak keuangan anggota DPRD	12	19	19		

29.	Pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan	23	22	5		
-----	---	----	----	---	--	--

Instrumen yang digunakan dalam pengukuran Indikator ini adalah alat ukur berupa skala dan kuesioner. Penyusunan alat ukur itu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi tujuan utama penggunaan alat ukur: Memperoleh Indeks Kepuasan.
2. Penentuan konstruk pengukuran: Komponen-komponen kepuasan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera BARat
3. Identifikasi indikator yang mewakili konstruk dan mendefinisikan ranah (*domain*) kualitas SDM, pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan sarana prasarana, pelayanan publik, dan pelayanan keuangan.
4. Menyiapkan rangkaian spesifikasi alat ukur, termasuk proporsi item yang akan dibuat berkaitan dengan persepsi Anggota DPR yang akan diukur dari konstruk.
5. Konstruksi sejumlah item (*items pooling*).
6. *Review* item, uji keterbacaan, *expert judgment* dan revisi.
7. *Tryout*: Pengambilan data lapangan pada sejumlah sampel representatif dari populasi yang dituju oleh alat ukur.
8. Analisis item: Pengujian statistik terhadap item-item alat ukur; jika diperlukan, menghilangkan item-item yang tidak memenuhi kriteria item yang baik atau melakukan revisi terhadap item-item itu.
9. Uji reliabilitas dan validitas bentuk alat ukur final.
10. Membuat manual administrasi, skoring, dan interpretasi terhadap skor alat ukur (diantaranya membuat tabel norma, standard performa, dan *cutting scores*).

Analisis data dilakukan menggunakan perhitungan statistik yang tepat dan sesuai untuk setiap variabel yang hendak diukur dan diteliti untuk mendapatkan deskripsi indikator dan dihitung indeks kepuasan dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Teknik analisis data yang digunakan mencakup statistik deskriptif, teknik analisis indeks kepuasan. Analisis data dari variabel-variabel yang menjadi komponen persepsi kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan dengan statistik deskriptif. Pengolahan data Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan skala *Likert* 1 sampai dengan 5 (skala terendah 1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Kurang Puas, 4 = Puas, dan skala tertinggi 5 = Sangat Puas).

Interpretasi hasil survei kepuasan pengguna layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat juga diperoleh dengan metode Rentang Kriteria sehingga dihasilkan nilai persentase.

Penghitungan rentang kriteria menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus = $T \times P_n$

T = jumlah responden

P_n = skor 1, 2, 3, 4, 5

Tahapan perhitungan sebagai berikut:

1. SP (Sangat puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat puas dikalikan
2. P (Puas) = Jumlah responden yang menjawab puas dikalikan 4
3. KP (Kurang puas) = Jumlah responden yang menjawab kurang puas dikalikan 3
4. TP (Tidak puas) = Jumlah responden yang menjawab tidak puas dikalikan 2
5. STP (Sangat tidak puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat tidak puas dikalikan 1
6. Selanjutnya semua hasil 1-5 dijumlahkan menjadi **TOTAL SKOR**

Sebagai pembandingan, apabila seluruh responden menyatakan sangat puas maka angka pembandingan adalah skor tertinggi yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: $Y = \text{Skor tertinggi Likert} \times \text{jumlah responden}$. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil interpretasi dalam persentase dihitung dengan rumus sebagai berikut: $\text{Rumus Indeks \%} = \text{TOTAL SKOR} \times 100\%$. Dengan Metode Penghitungan di atas, maka diperoleh hasil pada tabel berikut:

REKAPITULASI PERHITUNGAN SKOR INDEKS KEPUASAN ANGGOTA DPRD SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT					
1 Dukungan Sumber Daya Manusia					
No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
1.	Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	4,42	16,75	0,89	88,84
2.	Inisiatif, komunikasi, dan kerja sama PNS dalam memberikan	4,50	16,60	0,90	89,64

	dukungan layanan kepada Dewan.				
3.	Kecepatan penyiapan materi rapat Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)	4,52	16,65	0,90	90,31
4.	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan (skenario rapat untuk pimpinan, laporan singkat, draft kesimpulan)	4,48	16,65	0,90	89,51
5.	Disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja di luar jam kerja	4,40	16,70	0,88	88,18
6.	Pelayanan ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan Medical Check Up	4,38	16,65	0,88	87,51
	Jumlah	4,45	20,05	1,0025	89,00
2	Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas				
No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
7.	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas	4,44	16,60	0,88	88,44
8.	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas	4,54	16,75	0,91	91,25
9.	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan	4,52	16,70	0,91	90,58
10.	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas	4,38	16,70	0,88	87,78
11.	Kenyamanan dalam melaksanakan perjalanan dinas	4,44	16,65	0,89	88,71
12.	Kenyamanan ruang tunggu	4,44	16,60	0,88	88,44
	Jumlah	4,46	20,00	1,0000	89,20
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana				
No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)

		Likert) 1 - 5			
13.	Kualitas Ruang Kerja Anggota (kelengkapan sarana dan prasarana)	4,48	16,75	0,90	90,05
14.	Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang Rapat AKD (kelengkapan sarana dan prasarana)	4,42	16,70	0,89	88,58
15.	Kualitas Rumah Jabatan Pimpinan (RJP) (kelengkapan sarana dan prasarana)	4,48	16,65	0,90	89,51
16.	Kualitas sarana pendukung (toilet, taman, dan alat pendingin)	4,46	16,65	0,89	89,11
17.	Keramahan, kecepatan, dan ketelitian petugas dalam merespons keluhan (di lingkungan Gedung DPRD)	4,54	16,65	0,91	90,71
18.	Pelayanan dalam penyiapan konsumsi	4,56	16,60	0,91	90,84
	Jumlah		19,95	0,9975	89,80
4	Pelayanan Publik				
No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
19.	Keramahan Petugas Front Office Kantor Sekretariat DPRD	4,38	14,28	0,88	87,56
20.	Kecepatan dalam mempublikasikan kegiatan Kedewanan di media cetak dan online	4,32	14,30	0,86	86,49
21.	Penyediaan Informasi terhadap tamu	4,36	14,25	0,87	86,98
22.	Kecepatan dan Ketepatan pelayanan kepada tamu	4,38	14,24	0,87	87,32
23.	Pelayanan atas penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD	4,42	14,30	0,88	88,49
24.	Penerimaan Aspirasi Masyarakat	4,50	14,35	0,90	90,41
25.	Kecepatan atas tindak lanjut aspirasi masyarakat	4,48	14,28	0,90	89,56
	Jumlah	4,41	20,00	1	88,12
5	Pelayanan Keuangan				
No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)

		Likert) 1 - 5			
26.	Ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	4,28	25,00	0,86	85,60
27.	Kepuasan dalam memberikan informasi administrasi keuangan	3,86	25,05	0,77	77,35
28.	Ketepatan waktu dalam hal pembayaran hak keuangan anggota DPRD	3,86	25,00	0,77	77,20
29.	Pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan	4,36	24,95	0,87	87,03
	Jumlah	4,09	20,00	1	81,80
INDEKS KEPUASAN ANGGOTA DPRD SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT				Nilai Indeks	87,58
					SANGAT PUAS

b. Survei Pemangku Kepentingan Lainnya

Survei pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan melalui kotak pilihan kepuasan. Terdapat 3 (tiga) pilihan dalam penilaian pelayanan yakni (1) Sangat Puas, (2) Puas, (3) Tidak Puas. Adapun pemilihan opsi dengan tiga pilihan, karena Pemangku kepentingan lainnya tidak dihadapkan ke dalam sebuah kuesioner sepertihalnya anggota DPRD. Pemangku kepentingan lainnya diharapkan bisa memilih dengan cepat dan tegas mengenai pelayanan yang diperoleh dari Sekretariat DPRD secara umum.

Jumlah tamu dan pemangku kepentingan lainnya yang berkunjung ke DPRD selama tahun 2019 sebanyak 1252 orang. Jumlah tersebut dinyatakan valid, dan kemudian diambil dari jumlah yang dimasukkan ke kotak pilihan dengan hasil sebagai berikut:

Sangat Puas	=	892	orang
Puas	=	351	orang
Tidak puas	=	9	orang

Dengan menggunakan metode perhitungan yang sama dengan metode perhitungan terhadap Anggota DPRD maka diperoleh Skor sebagai berikut:

Pelayanan Secara Umum					
No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 3	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
1	Pelayanan terhadap pemangku Kepentingan lainnya	2,71	100	1	90,18
Berdasarkan Klasifikasi Penilaian, maka Predikat Pelayanan Sekretariat DPRD kepada pemangku kepentingan lainnya adalah:					Sangat Puas

c. Perhitungan Keseluruhan

Dengan mengikuti perhitungan keseluruhan maka diperoleh skor akhir sesuai tabel sebagai berikut:

Perhitungan Keseluruhan				
No	USER	Skor	Faktor Pembobot (%)	Sub Skor
1	Anggota DPRD	87,58	80%	70,065
2	Pemangku Kepentingan Lainnya	90,63	20%	18,035
Jumlah			100%	88,100
Berdasarkan Klasifikasi Penilaian, maka Predikat Pelayanan Sekretariat DPRD adalah:				Sangat Puas

2. Perbandingan antara target dengan realisasi

Capaian realisasi indikator kinerja berada pada skor 88,100. Berada di bawah target yakni pada skor 90. Predikat berdasarkan klasifikasi penilaian Pelayanan Sekretariat DPRD berada pada kategori "Sangat Puas". Antara target dan realisasi berada pada rentang yang sama.

Melihat dari hasil pencapaian target tahun 2019, Sekretariat DPRD Provinsi belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD ke depannya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan. Jika dilihat pada tabel REKAPITULASI SKOR INDEKS KEPUASAN ANGGOTA DPRD, maka bisa diketahui bahwa "Pelayanan Keuangan" memperoleh skor paling rendah yaitu **81,58**. Permasalahan "Pelayanan Keuangan" pada dasarnya telah menjadi masalah umum pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Masih rendahnya indeks penilaian pada pelayanan keuangan disebabkan karena masalah kelancaran pembayaran yang mana hal tersebut mengakibatkan respon negatif terhadap

pelayanan keuangan. Salah satunya adalah terlambatnya pengesahan APBD tahun 2020 berdampak kepada terlambatnya pembayaran tunjangan rutin yang diterima oleh anggota DPRD seperti tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi, dan lainnya. Disisi lain pelaksanaan aktivitas juga harus dilaksanakan seperti pelaksanaan Reses yang dijadwalkan minggu ketiga bulan Januari 2020. Oleh sebab itu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan terkait anggaran harus dilaksanakan secepat mungkin.

Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi Sekretariat DPRD untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pemangku kepentingan, terutama bagi anggota DPRD.

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017-2019 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				CAPAIAN (%)			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	-	-	87,10	88.10	-	-	97,63	97,89

Pada tahun 2017, dan tahun 2018 sudah dilaksanakan dengan poin Indeks Kepuasan 87,10, kemudian pada tahun 2019, poin indeks naik sebesar 1 poin yaitu 88,10. Kenaikan tersebut merupakan bentuk dari evaluasi dari tahun sebelumnya. Dengan terjadinya kenaikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi 2018 telah dilaksanakan pada tahun 2019. Namun perhatian khusus tertuju kepada pelayanan kepada pemangku kepentingan lainnya yaitu melorot dari 97,82 pada tahun 2018 menjadi 90,63. Walaupun masih dalam rentang klasifikasi yang sama, namun terlihat mencolok dari sisi poin yaitu turun hingga 7 poin. Penyebab turunnya kepuasan tersebut adalah karena tahun 2019 merupakan tahun politik bagi calon-calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Informasi seharusnya terbuka untuk publik, namun berkembang tidak seperti yang diharapkan. Ditambah dengan kasus anarkis yang menyebabkan rusaknya beberapa sarana dan prasarana gedung kantor 2019 akibat demonstrasi bertema "pelemahan KPK" yang notabene merupakan kebijakan pusat, dan telah ditindaklanjuti sesuai permintaan demonstran. Namun hal tersebut menjadi indikator bahwa masyarakat tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan Sekretariat DPRD secara khusus.

4. Faktor pendukung pencapaian target

Langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk pencapaian target indeks kepuasan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi hasil pelayanan tahun 2018 untuk perbaikan tahun 2019
2. Meningkatkan koordinasi dengan anggota DPRD melalui penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga ahli.

5. Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 1

Hampir seluruh Program/Kegiatan ditujukan untuk mendukung sasaran strategis 1 sekretariat DPRD Pada tahun 2019. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Anggaran	REALISASI	
			Rp	%
BELANJA LANGSUNG				
		94.567.086.838,00	87.983.324.499,13	93,04
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.571.622.621,00	14.010.517.610,57	96,15
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.934.381.700,00	1.926.904.354,00	99,61
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.197.800.000,00	2.009.027.996,00	91,41
3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	2.430.051.649,00	2.422.274.107,57	99,68
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	411.800.000,00	349.530.150,00	84,88
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	379.479.272,00	376.924.619,00	99,33
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	286.495.300,00	270.085.000,00	94,27
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	781.233.600,00	690.888.000,00	88,44
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	112.702.400,00	108.783.000,00	96,52
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.775.000,00	134.461.000,00	97,59
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	64.305.000,00	60.525.000,00	94,12
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	699.826.400,00	664.913.000,00	95,01
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	3.399.392.000,00	3.337.455.784,00	98,18
13	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	43.600.000,00	33.600.000,00	77,06
14	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.385.060.000,00	1.317.780.500,00	95,14

15	Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD	307.720.300,00	307.365.100,00	99,88
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	-
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.118.009.038,00	10.505.168.512,56	86,69
1	Pengadaan mebeleur	764.537.920,00	660.797.920,00	86,43
2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	446.700.320,00	440.109.120,00	98,52
3	Pengadaan eralatan Studio Komunikasi dan Informasi	993.881.718,00	985.880.200,00	99,19
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	105.500.000,00	94.624.300,00	89,69
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.281.300.000,00	1.273.775.900,00	99,41
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas	1.124.173.325,00	1.058.441.011,00	94,15
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	426.100.000,00	410.170.820,00	96,26
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler	166.750.000,00	163.355.000,00	97,96
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	38.550.000,00	38.518.000,00	99,92
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	160.000.000,00	157.975.000,00	98,73
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	295.450.000,00	271.096.886,00	91,76
12	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.350.000.000,00	1.344.860.000,00	99,62
13	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	506.080.000,00	491.850.440,00	97,19
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess	828.416.255,00	823.846.947,56	99,45
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	243.550.000,00	211.322.000,00	86,77
16	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.195.169.500,00	1.931.694.968,00	60,46
17	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	191.850.000,00	146.850.000,00	76,54
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.567.050.000,00	1.560.857.500,00	99,60
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.567.050.000,00	1.560.857.500,00	99,60
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	223.470.000,00	174.879.129,00	78,26
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	162.780.000,00	123.708.148,00	76,00
2	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	60.690.000,00	51.170.981,00	84,32

E	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	64.392.604.379,00	60.057.392.006,00	93,27
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	3.984.517.100,00	3.898.949.350,00	97,85
2	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah	17.147.632.293,00	15.415.342.472,00	89,90
3	Pembahasan Rancangan Perda	21.829.169.807,00	20.509.006.565,00	93,95
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda	2.215.010.380,00	2.199.637.400,00	99,31
5	Reses	5.631.680.000,00	5.179.248.376,00	91,97
6	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	203.694.800,00	201.078.450,00	98,72
7	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	6.325.268.287,00	6.099.434.100,00	96,43
8	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	6.463.530.300,00	5.985.968.881,00	92,61
9	Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda	136.273.212,00	135.573.212,00	99,49
10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	387.308.500,00	387.308.500,00	100,00
11	Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat	18.154.200,00	17.054.200,00	93,94
12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	50.365.500,00	28.790.500,00	57,16

B. Sasaran Strategis II

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi, Indikator Kinerja 1 (satu): Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Indikator Kinerja 2 (dua): Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/ Kegiatan

Sasaran Strategis II Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan pencapaian Kinerja Organisasi yang bersifat internal. Adapun pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Huruf	A	

Dari tabel di atas belum dapat dilihat pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2 (dua) yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja karena belum dilakukan penilaian oleh Tim penilaian SAKIP karena masih dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019.

b. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/ Kegiatan

Total realisasi belanja daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 tercatat sebesar Rp 137.446.684.403,13,- (Seratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh enam juta enam taus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga koma tiga belas rupiah) jumlah tersebut mencapai 95.37% dari jumlah total dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 144.126.078.603,- (Seratus empat puluh empat milyar seratus dua puluh enam juta sembilan puluh tujuh delapan ribu enam ratus tiga rupiah), belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 49.558.991.765,- (Empat puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan Belanja Langsung (BL) Sekretariat DPRD sebesar Rp Rp 94.567.086.838,- (Sembilan puluh empat milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan realisasi Belanja Tidak langsung sebesar Rp 49.463.359.904,- atau 99,81% dari total belanja tidak langsung, kemudian realisasi belanja langsung (BL) sebesar 87.983.324.499,13 atau 93,04 % dari jumlah dana belanja langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, gaji dan tunjangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat serta Uang Duka Wafat/Tewas, Uang Jasa Pengabdian, Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif

Belanja Langsung Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 terdiri dari 6 (enam) Program dengan 52 (lima puluh dua) kegiatan adalah sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat 16 (enam belas) kegiatan dengan realisasi sebesar **14.010.517.610,57,-** atau 93.04% dari total anggaran Rp 15.645.833.356,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran	REALISASI			Sisa Anggaran
			Fisik	Keuangan		
			%	Rp	%	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.571.622.621,00	100,00	14.010.517.610,57	96,15	561.105.010,43
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.934.381.700,00	100,00	1.926.904.354,00	99,61	7.477.346,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.197.800.000,00	100,00	2.009.027.996,00	91,41	188.772.004,00
3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	2.430.051.649,00	100,00	2.422.274.107,57	99,68	7.777.541,43
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	411.800.000,00	100,00	349.530.150,00	84,88	62.269.850,00
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	379.479.272,00	100,00	376.924.619,00	99,33	2.554.653,00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	286.495.300,00	100,00	270.085.000,00	94,27	16.410.300,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	781.233.600,00	100,00	690.888.000,00	88,44	90.345.600,00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	112.702.400,00	100,00	108.783.000,00	96,52	3.919.400,00
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.775.000,00	100,00	134.461.000,00	97,59	3.314.000,00
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	64.305.000,00	100,00	60.525.000,00	94,12	3.780.000,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	699.826.400,00	100,00	664.913.000,00	95,01	34.913.400,00
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	3.399.392.000,00	100,00	3.337.455.784,00	98,18	61.936.216,00
13	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	43.600.000,00	100,00	33.600.000,00	77,06	10.000.000,00
14	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.385.060.000,00	100,00	1.317.780.500,00	95,14	67.279.500,00
15	Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD	307.720.300,00	100,00	307.365.100,00	99,88	355.200,00
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	-	-	-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp **10.505.168.512,56,-** atau **86,69%** dari jumlah anggaran sebesar Rp. 12.118.009.038,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran	REALISASI			Sisa Anggaran
			Fisik	Keuangan		
			%	Rp	%	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.118.009.038,00	100,00	10.505.168.512,56	86,69	1.612.840.525,44
1	Pengadaan mebeleur	764.537.920,00	100,00	660.797.920,00	86,43	103.740.000,00
2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	446.700.320,00	100,00	440.109.120,00	98,52	6.591.200,00
3	Pengadaan eralatan Studio Komunikasi dan Informasi	993.881.718,00	100,00	985.880.200,00	99,19	8.001.518,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	105.500.000,00	100,00	94.624.300,00	89,69	10.875.700,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.281.300.000,00	100,00	1.273.775.900,00	99,41	7.524.100,00
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas	1.124.173.325,00	100,00	1.058.441.011,00	94,15	65.732.314,00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	426.100.000,00	100,00	410.170.820,00	96,26	15.929.180,00
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler	166.750.000,00	100,00	163.355.000,00	97,96	3.395.000,00
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	38.550.000,00	100,00	38.518.000,00	99,92	32.000,00
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	160.000.000,00	100,00	157.975.000,00	98,73	2.025.000,00
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	295.450.000,00	100,00	271.096.886,00	91,76	24.353.114,00
12	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.350.000.000,00	100,00	1.344.860.000,00	99,62	5.140.000,00
13	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	506.080.000,00	100,00	491.850.440,00	97,19	14.229.560,00
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess	828.416.255,00	100,00	823.846.947,56	99,45	4.569.307,44
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	243.550.000,00	100,00	211.322.000,00	86,77	32.228.000,00
16	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.195.169.500,00	100,00	1.931.694.968,00	60,46	1.263.474.532,00
17	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	191.850.000,00	100,00	146.850.000,00	76,54	45.000.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdapat 1 (satu) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 1.560.857.500,- atau 99,60% dari anggaran sebesar Rp 1.567.050.000,-.

No	Program/Kegiatan	Anggaran	REALISASI			Sisa Anggaran
			Fisik	Keuangan		
			%	Rp	%	
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.567.050.000,00	100,00	1.560.857.500,00	99,60	6.192.500,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.567.050.000,00	100,00	1.560.857.500,00	99,60	6.192.500,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdapat 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp **174.879.129,-** atau 78,26% dari anggaran sebesar Rp223.470.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran	REALISASI			Sisa Anggaran
			Fisik	Keuangan		
			%	Rp	%	
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	223.470.000,00	100,00	174.879.129,00	78,26	48.590.871,00
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	162.780.000,00	100,00	123.708.148,00	76,00	39.071.852,00
2	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	60.690.000,00	100,00	51.170.981,00	84,32	9.519.019,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan terdapat 4 (Empat) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp **1.674.509.741,00,-** atau **98,83%** dari anggaran sebesar Rp 1.694.330.800,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran	REALISASI			Sisa Anggaran
			Fisik	Keuangan		
			%	Rp	%	
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.694.330.800,00	100,00	1.674.509.741,00	98,83	19.821.059,00
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	317.845.000,00	100,00	317.482.550,00	99,89	362.450,00
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	546.600.200,00	100,00	545.299.600,00	99,76	1.300.600,00
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	383.257.000,00	100,00	382.615.291,00	99,83	641.709,00

4	Pengelolaan , Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD	446.628.600,00	100,00	429.112.300,00	96,08	17.516.300,00
---	--	----------------	--------	----------------	-------	---------------

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah terdapat 12 (sebelas) kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp **60.057.392.006,-** atau **93,27%** dari anggaran sebesar Rp 64.392.604.379,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran	REALISASI			Sisa Anggaran
			Fisik	Keuangan		
			%	Rp	%	
F	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	64.392.604.379,00	100,00	60.057.392.006,00	93,27	4.335.212.373,00
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	3.984.517.100,00	100,00	3.898.949.350,00	97,85	85.567.750,00
2	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah	17.147.632.293,00	100,00	15.415.342.472,00	89,90	1.732.289.821,00
3	Pembahasan Rancangan Perda	21.829.169.807,00	100,00	20.509.006.565,00	93,95	1.320.163.242,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda	2.215.010.380,00	100,00	2.199.637.400,00	99,31	15.372.980,00
5	Reses	5.631.680.000,00	100,00	5.179.248.376,00	91,97	452.431.624,00
6	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	203.694.800,00	100,00	201.078.450,00	98,72	2.616.350,00
7	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	6.325.268.287,00	100,00	6.099.434.100,00	96,43	225.834.187,00
8	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	6.463.530.300,00	100,00	5.985.968.881,00	92,61	477.561.419,00
9	Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda	136.273.212,00	100,00	135.573.212,00	99,49	700.000,00
10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	387.308.500,00	100,00	387.308.500,00	100,00	-
11	Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat	18.154.200,00	100,00	17.054.200,00	93,94	1.100.000,00
12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	50.365.500,00	100,00	28.790.500,00	57,16	21.575.000,00

2. Perbandingan antara target dengan realisasi

Perbandingan antara target dengan realisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	Target	Realisasi	
			Realisasi	%
1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	A	-	
2	Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan	97%	93,04%	95,92%

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	Target			Realisasi		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	A	A	A	BB	BB	-
2	Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan	95%	95%	97%	82,42%	92,88%	93,04%

Perbandingan Indikator Kinerja 1 (satu) tidak dapat diukur karena untuk tahun 2019 masih dilakukan proses penilaian.

Perbandingan Indikator Kinerja 2 (dua) yaitu "Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan" terdapat peningkatan dari 92,88 menjadi 93,04. Kenaikan tidak signifikan karena dengan realisasi sudah mendekati titik kulmasi dari realisasi anggaran yaitu 97%. Peningkatan tersebut tidak lepas dari komitmen Sekretariat DPRD untuk selalu berusaha meningkatkan kinerja melalui perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

4. Faktor Pendukung pencapaian target

a. Indikator kinerja 1

Pencapaian target Indikator kinerja 1 yaitu "Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja" sangat bergantung kepada konsistensi antara target dalam dokumen RPJMD, Renstra, Renja dengan Laporan Kinerja OPD. Kesesuaian seluruh dokumen sudah seharusnya di maksimalkan dengan kelengkapan data dan fakta pendukung. Di samping tugas pelayanan kepada pemangku kepentingan, Sekretariat DPRD diharuskan tetap berjalan sesuai arah yang telah ditentukan. Pengoptimalan fungsi sumber daya yang tersedia

menjadi kunci penting bagi sekretariat DPRD dalam rangka pencapaian target sesuai dengan dokumen penetapan perjanjian kinerja.

b. Indikator kinerja 2

Indikator kinerja 2 (dua) berkaitan dengan kondisi Riil dengan pengukuran yang bisa dilakukan sendiri pada akhir tahun anggaran. Sesuai dengan pengukuran tahun 2019, realisasi anggaran mencapai 94,96%.

Realisasi anggaran Sekretariat DPRD sangat bergantung kepada aktivitas kedewanan anggota DPRD. Koordinasi intensif antara sekretariat DPRD dengan anggota DPRD harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Untuk mensiasati hal tersebut Sekretariat DPRD senantiasa mencermati aktivitas kedewanan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Hal itu semata-mata adalah untuk mematangkan perencanaan, dan tentunya bisa dianalisa sehingga bisa memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah ke depannya.

5. Program/Kegiatan Yang mendukung Sasaran Strategis II

Program/Kegiatan pendukung Sasaran strategis II (dua) adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan terdapat 4 (empat) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp **1.674.509.741,00,-** atau **98,83%** dari anggaran sebesar Rp 1.694.330.800,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis II

No	Program/Kegiatan	Anggaran	REALISASI			Sisa Anggaran
			Fisik	Keuangan		
			%	Rp	%	
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.694.330.800,00	100,00	1.674.509.741,00	98,83	19.821.059,00
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	317.845.000,00	100,00	317.482.550,00	99,89	362.450,00
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	546.600.200,00	100,00	545.299.600,00	99,76	1.300.600,00
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	383.257.000,00	100,00	382.615.291,00	99,83	641.709,00
4	Pengelolaan , Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD	446.628.600,00	100,00	429.112.300,00	96,08	17.516.300,00

3.1.4. Hasil Pengukuran Sasaran Strategis Pada Target RPJMD Tahun 2016-2021

Sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berada pada Misi 2 RPJMD yaitu "Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Bersih, dan Profesional". Sekretariat DPRD tidak bertanggungjawab penuh ke dalam salah satu Sasaran Strategis RPJMD. Walaupun demikian, dalam rangka pencapaian RPJMD Provinsi, Sekretariat DPRD selalu berusaha melaksanakan Tata Pemerintahan/Organisasi yang Baik, Bersih, dan Profesional.

3.1.5. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 terdapat 6 (enam) program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan, program dan kegiatan yang ada tersebut telah dilaksanakan dengan capaian Realisasi Anggaran mencapai 94,96%.

Total realisasi belanja daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 tercatat sebesar Rp 137.446.684.403,13,- (Seratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh enam juta enam taus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga koma tiga belas rupiah) jumlah tersebut mencapai 95.37% dari jumlah total dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 144.126.078.603,- (Seratus empat puluh empat milyar seratus dua puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah), belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 49.558.991.765,- (Empat puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan Belanja Langsung (BL) Sekretariat DPRD sebesar Rp Rp 94.567.086.838,- (Sembilan puluh empat milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan realisasi Belanja Tidak langsung sebesar Rp 49.463.359.904,- atau 99,81% dari total belanja tidak langsung, kemudian realisasi belanja langsung (BL) sebesar 87.983.324.499,13 atau 93,04 % dari jumlah dana belanja langsung.

BAB IV P E N U T U P

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Kepada Gubernur Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat pada umumnya.

Dilihat dari pencapaian sasaran/target kinerja dari masing-masing Program dan Kegiatan untuk Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD pada Program pokok yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, mencapai target keuangan sebesar 93,27%, dari capaian yang diperoleh tersebut terhadap pelayanan kepada DPRD di bawah target yang ditetapkan yaitu 97%, bukan berarti Sekretariat DPRD tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unsur staf yang memberikan pelayanan kepada DPRD, sebetulnya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal dan secara fisik 100%. Sebagai contoh Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Target yang dicapai adalah sebanyak 23 Ranperda itu sudah difasilitasi semuanya untuk dilakukan pembahasan dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebanyak 19 Peraturan Daerah yang 4 (empat) Ranperda sudah dilakukan pembahasan bahkan sudah dilakukan konsultasi awal dan pembahasannya dilanjutkan tahun 2020. Selanjutnya yang menyebabkan realisasi keuangan dibawah target adalah efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan seperti contoh Badan Pembentukan Perda melaksanakan 6 kali konsultasi dalam Perencanaan Anggaran dianggarkan sebanyak 4 hari tapi dalam pelaksanaan hanya dilakukan 3 hari saja, selanjutnya studi banding direncanakan selama 4 hari dilaksanakan hanya sebanyak 3 hari, selanjutnya Konsultasi KUA PPAS Perubahan Tahun 2019 dan KUA PPAS Tahun 2020 dilaksanakan satu kali saja padahal dalam perencanaan dianggarkan terpisah sehingga terjadi penghematan yang berdampak kepada realisasi keuangan

Selanjutnya pada masing-masing program pelaksanaan kegiatan pada umumnya sudah memenuhi target minimal yang ditetapkan walaupun masih ada beberapa kegiatan yang tergetnya dibawah target minimal disebabkan karena keadaan teknis seperti efisiensi penggunaan anggaran, yang merupakan salah satu tujuan dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2019 ini, penggabungan kegiatan seharusnya dilaksanakan dua kali dijadikan satu kali. sehingga menyebabkan rendahnya capaian kinerja keuangan, namun secara umum dapat kami simpulkan bahwa sepanjang tahun 2019, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur staf yang memberikan pelayanan kepada DPRD sudah berhasil atau mampu

mengemban tugas pokok dan fungsi dengan baik. Pelaksanaannya adalah dengan cara memberikan pelayanan kepada DPRD dan masyarakat pada umumnya secara optimal dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana dan prasarana pendukung serta Sumber Daya Manusia yang ada. Perhatian khusus Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target dan diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk kegiatan yang sudah mencapai target yang ditetapkan perlu ditingkatkan dan dipertahankan sehingga Sekretariat DPRD mampu melaksanakan fungsinya sebagai pelayan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat pada umumnya serta menjembatani antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan pemerintahan di Sumatera Barat.

Dalam kaitan pemberian dukungan yang memuaskan, yang dilakukan oleh suatu organisasi, terutama instansi pemerintah, David Osborne dan Ted Gaebler (1997), mengatakan perlunya transformasi terhadap pola kerja birokrasi yang tenang dan serius menjadi organisasi yang inovatif, fleksibel, dan responsif. Dalam kaitan ini, hal yang harus dihindari adalah keterikatan pegawai oleh berbagai peraturan dan ketetapan kaku karena tugas-tugas yang monoton.

Oleh karena itu, organisasi perlu mengubah orientasi melalui 3 (tiga) hal, yaitu pertama, organisasi digerakkan oleh misi, dengan mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan, yaitu bahwa yang menjadi kekuatan penentu bagi pelaksanaan pekerjaan adalah misinya, tujuan dasarnya. Kedua, berorientasi pelanggan, dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu yang terpenting adalah mendengarkan pelanggan, meminta kepada pelanggan untuk membuat presentasi yang menggambarkan kebutuhan mereka kepada para pegawainya. Ketiga, berorientasi kepada hasil, mengubah fokus kegiatan dari masukan tanpa memperhatikan hasil menjadi fokus meletakkan ukuran kepada akuntabilitas kinerja dan hasil. Agar organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dapat diakui keberadaannya seperti halnya organisasi organik lainnya, maka ia harus adaptif. Adaptif adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan lingkungan yang terjadi, baik lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Melalui adaptasi lingkungan internal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat harus melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi yang diperkirakan dapat menghambat kemampuan organisasi. Secara umum, Anggota DPRD Sumatera Barat sebagai penerima layanan adalah pihak yang secara langsung menerima, menikmati, dan merasakan layanan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat perlu menyuarakan perasaannya terhadap kualitas

dukungan yang diterimanya. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap dukungan yang diterimanya dapat menjadi pembangun atau perusak sistem kerja. Oleh karena itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan misinya selalu harus berusaha mendengar suara dari para Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dengan adanya Laporan Kinerja tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat bekerja lebih baik lagi, guna perbaikan kinerja ke depan sehingga program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana telah dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Padang, 15 Januari 2020

**SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT**



H. RAFLIS, SH, MM

Pembina / Utama Muda

NIP. 19640930 198602 1 002

LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Raflis, SH, MM**
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc**
Jabatan : Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Selaku Atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut adalah tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

IRWAN PRAYITNO

Padang, 2 Januari 2019
Pihak Pertama,

H. RAFLIS, SH,MM
NIP. 196409301986021002

PERJANJIAN KINERJA ESELON II

SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

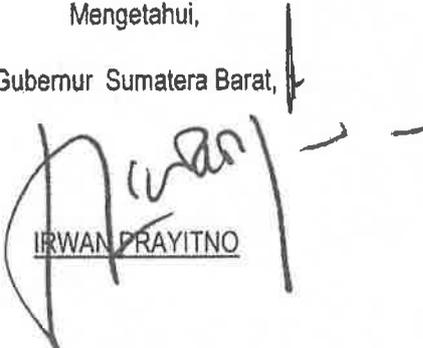
Tahun : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	A
		b. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	97%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.518.323.336,00	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14.215.994.557,00	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	1.608.050.000,00	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	245.300.000,00	
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.473.217.160,00	
6	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	59.141.790.517,00	
Jumlah		89.202.675.570,00	

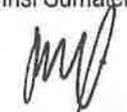
Mengetahui,

Gubernur Sumatera Barat,


IRWAN PRAYITNO

Padang, 02 Januari 2019

Sekretaris DPRD
Provinsi Sumatera Barat,


H. RAFLIS, SH, MM
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 196409301986021002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Riswandi, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. Rafli, SH, MM**
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Selaku Atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut adalah tanggung jawab kami.

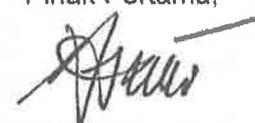
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H. RAFLI, SH, MM
NIP. 196409301986021002

Padang, 26 April 2019

Pihak Pertama,


RISWANDI, S.Sos
NIP. 196502131992031005

PERJANJIAN KINERJA ESELON III

SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

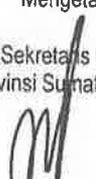
Tahun : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi	1 Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	90%
		2 Waktu penyampaian laporan	tepat waktu
2	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan organisasi	90%
3	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan	Persentase berkurangnya kesalahan hasil verifikasi keuangan	100%
4	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Persentase berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	237.832.000	
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	458.743.080	
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	351.204.000	
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.347.428.473	
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala	198.250.000	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	194.799.900	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	617.060.000	
8	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	70.800.000	
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	167.260.000	
10	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	78.040.000	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	2.291.609.800	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.673.638.373	
13	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	2.952.000.000	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.413.317.613	
15	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	80.900.000	
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	302.850.000	
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.706.400	
18	Penyediaan peralatan rumah tangga	68.400.000	
19	Penyediaan Makanan dan Minuman	64.305.000	
20	Pengadaan mebeleur	980.000.000	
21	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	29.500.000	
22	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	185.000.000	
23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	120.000.000	
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	78.500.000	
25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.171.300.000	
26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	825.872.750	
27	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	268.200.000	
28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	75.750.000	
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	38.550.000	
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	115.000.000	
31	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	218.887.150	
32	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	1.350.000.000	
33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	336.900.000	
34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	643.297.467	
35	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.050.000	
36	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	750.400.000	
37	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	7.858.787.190	
38	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	425.438.080	
	Jumlah	30.274.577.276	

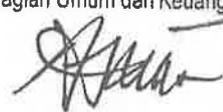
Mengetahui,

Sekretaris DPRD
Provinsi Sumatera Barat,


H. RAFLIS, S.H., MM
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 196409301986021002

Padang, 26 April 2019

Kepala Bagian Umum dan Keuangan,


RISWANDI, S.Sos
Pembina - IV/a
NIP. 196502131992031003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

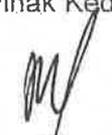
Nama : **H. Jon Lizar, SH, M.Si**
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. Raflis, SH, MM**
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Selaku Atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut adalah tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H. RAFLIS, SH, MM
NIP. 196409301986021002

Padang, 26 April 2019
Pihak Pertama,


H. JON LIZAR, SH, M.Si
NIP. 196202221984111001

PERJANJIAN KINERJA ESELON III

SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Tugas Kedewanan	Jumlah Pelayanan Tugas Kedewanan	72 kali
2	Meningkatnya Pengelolaan Kehumasan, Protokoler, dan Asplasi	1 Jumlah Publikasi yang disampaikan kepada masyarakat/pemangku kepentingan lainnya	1008 kali
		2 Persentase Pelayanan protokoler	100%
		3 Jumlah Dokumentasi Kegiatan AKD/Pemangku Kepentingan	120 dok
3	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Persentase berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	100%

No	Programi/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pembahasan Rancangan Perda	20.224.519.700	
2	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	83.215.000	
3	Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda	166.130.000	
4	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	983.649.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	574.100.000	
6	Pengelolaan dan pendataan Dokumen Arsip SKPD	277.796.150	
7	Penyebarnya Informasi Pembangunan Daerah	3.338.039.850	
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	2.001.050.380	
9	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah	16.414.971.200	
10	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	4.291.767.100	
Jumlah		48.355.238.380	

Mengetahui,

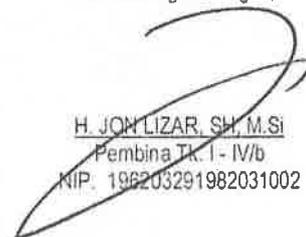
Sekretaris DPRD
Provinsi Sumatera Barat



H. RAFLIS, SH, MM
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 196409301986021002

Padang, 26 April 2019

Kepala Bagian Persidangan dan
Perundang-undangan,



H. JON LIZAR, SH, M.Si
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 196203291982031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rismunandar, SE**
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. Rafli, SH, MM**
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Selaku Atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

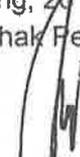
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut adalah tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H. RAFLIS, SH, MM
NIP. 196409301986021002

Padang, 20 April 2019
Pihak Pertama,


RISMUNANDAR, SE
NIP. 196212171986031009

PERJANJIAN KINERJA ESELON III

SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Tahun : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Tugas Kedewanan	Jumlah Pelayanan Tugas Kedewanan	120 kali
2	Meningkatnya Fasilitasi Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang difasilitasi	- 4 kegiatan - 1 kegiatan
3	Meningkatnya Pengelolaan Tindaklanjut Penyampaian Aspirasi ke DPRD	Jumlah Pelayanan Aspirasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Kewenangan	120 kali
4	Meningkatnya Pengawasan Internal Organisasi	Persentase Berkurangnya Temuan Pemeriksaan Terhadap Organisasi	100%

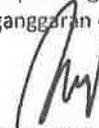
No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	6.325.268.287	
2	Reses	5.313.180.000	
Jumlah		11.638.448.287	

Mengetahui :
 Sekretaris DPRD
 Provinsi Sumatera Barat



H. RAFLIS, SH, MM
 Pembina Utama Muda - IV/c
 NIP. 19640930 198602 1 002

Padang, 26 April 2019
 Kepala Bagian
 Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan



RISMUNANDAR, SE
 Pembina - IV/a
 NIP. 19621217 198603 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Elliwirda, SH, MM**
Jabatan : Ka.Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Riswandi, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Selaku Atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut adalah tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

RISWANDI, S.Sos
NIP. 196502131992031005

Padang, 26 April 2019
Pihak Pertama,

ELLIWIRDA, SE, MM
NIP. 196211091992022001

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase usulan kenaikan pangkat , usulan pensiun, usulan KGB yang diproses tepat waktu	100%
2	Ketersediaan data kepegawaian yang akurat	Persentase ketersediaan data kepegawaian	100%
3	Meningkatnya Pejabat ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN	Persentase Pejabat di organisasi yang mengisi LHKPN/LHKASN	100%
4	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Persentase berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.347.428.473	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	198.250.000	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	194.799.900	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	617.060.000	
5	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	70.800.000	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	167.260.000	
7	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	78.040.000	
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	2.291.609.800	
Jumlah		2.673.638.373	

Mengetahui,

Kepala Bagian Umum dan Keuangan,



RISWANDI, S.Sos
Pembina - IV/a
NIP. 196502131992031005

Padang, 26 April 2019

Kepala Sub Bagian
Tata Usaha & Kepegawaian,



ELLIWIRDA, SE, MM
Pembina - IV/a
NIP. 196211091992022001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yasmin, SE**
Jabatan : Ka.Subbag. Program dan Keuangan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Riswandi, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Selaku Atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut adalah tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

RISWANDI, S.Sos

NIP. 196502131992031005

Padang, 26 April 2019

Pihak Pertama,

YASMIN, SE

NIP. 198012252010012013

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Tahun : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja) dan pelaporan organisasi	Persentase penurunan temuan pemeriksaan terhadap organisasi	100%
		Jumlah dokumen pelaporan yang disampaikan tepat waktu	4 dok
2	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja organisasi	Nilai pelaporan kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat	A
3	Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan	Penyampaian SPJ paling lama 5 hari setelah bulan berkenan	5 hari
4	Meningkatnya kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan aturan	Persentase SPJ yang administrasinya lengkap	100%
		Persentase SPJ yang sesuai dengan aturan penatausahaan keuangan	100%
5	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Persentase berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	237.832.000	
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	458.743.080	
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	351.204.000	
Jumlah		1.047.779.080	

Mengetahui,

Kepala Bagian Umum dan Keuangan,



RISWANDI, S.Sos
Pembina - IV/a
NIP. 196502131992031005

Padang, 26 April 2019

Kepala Sub Bagian
Program dan Keuangan,



YASMIN, SE
Penata - III/c
NIP. 198012252010012013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ulil Amra, S.Sos. MM**
Jabatan : Ka. Subbag. Rumah Tangga
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Riswandi, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Selaku Atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut adalah tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

RISWANDI, S.Sos
NIP. 196502131992031005

Padang, 26 April 2019

Pihak Pertama,

ULIL AMRA, S.Sos. MM
NIP. 196410141986101002

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengelolaan Sarana Prasarana	a. Persentase BMD dalam kondisi baik	100%
		b. Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras pendukung kinerja	100%
2	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Persentase berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.952.000.000	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	2.413.317.613	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.900.000	
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	302.850.000	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.706.400	
6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.400.000	
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	64.305.000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	980.000.000	
9	Pengadaan mebeleur	29.500.000	
10	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	185.000.000	
11	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	120.000.000	
12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	78.500.000	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.171.300.000	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	825.872.750	
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	268.200.000	
16	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	75.750.000	
17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	38.550.000	
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	115.000.000	
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	218.887.150	
20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.350.000.000	
21	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	336.900.000	
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	643.297.467	
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	150.050.000	
24	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	750.400.000	
25	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	1.608.050.000	
26	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	7.858.787.190	
27	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	425.438.080	
Jumlah		23.195.961.650	

Mengetahui,

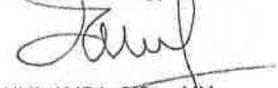
Kepala Bagian Umum dan Keuangan



RISWANDI, S.Sos
Pembina - IV/a
NIP. 196502131992031005

Padang, 26 April 2019

Kepala Sub Bagian
Rumah Tangga



ULIL AMRA, S.Sos, MM
Pembina - IV/a
NIP. 196410141986101002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

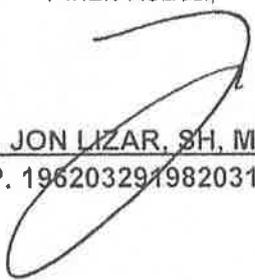
Nama : Laswardi, SH, M. Hum
Jabatan : Ka.Subbag. Humas, Protokol dan Publikasi
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. Jon Lizar, SH, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan
Selaku Atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut adalah tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H. JON LIZAR, SH, M.Si
NIP. 196203291982031002

Padang, 26 April 2019
Pihak Pertama,


LASWARDI, SH, M. Hum
NIP. 196307141986031007

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Tahun : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Publikasi Kegiatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	Presentase Perda/produk Hukum dan Aktivitas yang terpublikasi	100%
2	Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan	a Jumlah Dokumentasi Kegiatan	1500 kali
		b Jumlah bahan bacaan perpustakaan	90 dok
3	Meningkatnya pelayanan protokol Pimpinan DPRD	Persentase pelayanan protokol Pimpinan DPRD	100%
4	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Persentase berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	574.100.000	
2	Pengelolaan dan pendataan Dokumen Arsip SKPD	277.796.150	
3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	3.338.039.850	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	2.001.050.380	
Jumlah		6.190.986.380	

Mengetahui,

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,



H. JON LIZAR, SH, M.Si
 Pembina Tk. I-IV/b

Padang, 26 April 2019

Kepala Sub/Bagian Humas, Protokol, dan Publikasi



LASWARDI, SH, M.Hum
 Pembina -IV/a
 NIP. 196307141986031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

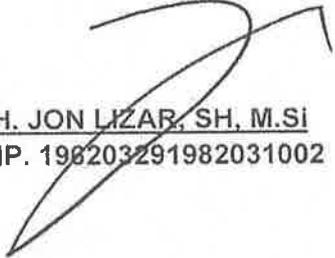
Nama : **Kadri, S.Sos**
Jabatan : Ka. Subbag. Persidangan dan Risalah
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. Jon Lizar, SH, M.Si**
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Selaku Atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut adalah tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H. JON LIZAR, SH, M.Si
NIP. 196203291982031002

Padang, 26 April 2019
Pihak Pertama,


KADRI, S.Sos
NIP. 196207191985031003

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Tahun : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Sidang Dewan	1 Jumlah Sidang yang difasilitasi	64 kali
		2 Jumlah dokumen risalah	128 dok
2	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Persentase berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah	16.414.971.200	
2	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	4.291.767.100	
Jumlah		20.706.738.300	

Mengetahui,

Kepala Bagian Persidangan dan
Perundang-undangan,

H. JON LIZAR, SH, M.Si

Pembina Tk. I - IV/b

NIP. 196203291982031002

Padang, 26 April 2019

Kepala Sub Bagian
Persidangan dan Risalah,

KADRI, S.Sos

Penata Tk. I - III/d

NIP. 196207191985031003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

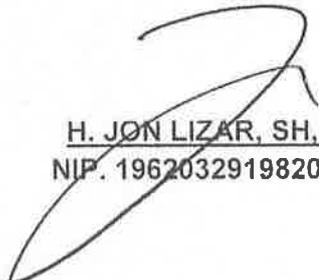
Nama : **Elvi Yanos Alpa, SH, M.AP**
Jabatan : Ka.Subbag. Kajian Perundang-undangan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. Jon Lizar, SH, M.Si**
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan
Selaku Atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut adalah tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H. JON LIZAR, SH, M.Si
NIP. 196203291982031002

Padang, 26 April 2019

Pihak Pertama,


ELVI YANOS ALPA, SH, M.AP
NIP. 197401051999032003

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Tahun : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Rapat-rapat Dewan	Jumlah Rapat yang difasilitasi	120 kali
2	Meningkatnya Pelayanan Dukungan Keahlian DPRD	Jumlah Dukungan Keahlian Lembaga	21 keg
3	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Persentase berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pembahasan Rancangan Perda	20.224.519.700	
2	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	83.215.000	
3	Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda	166.130.000	
4	Sosialisasi Peraluran Perundang Undangan	983.649.000	
Jumlah		21.457.513.700	

Mengetahui,

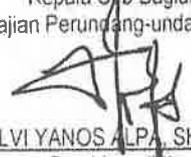
Kepala Bagian Persidangan dan
Perundang-undangan,



H. JON LIZAR, SH, M.Si
 Pembina Tk. I - IV/b
 NIP. 196203291982031002

Padang, 26 April 2019

Kepala Sub Bagian
Kajian Perundang-undangan,



ELVI YANOS ALPA, SH, M.p
 Pembina - IV/a
 NIP. 197401051999032003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Erizal Hasan, SE**
Jabatan : Ka.Subbag. Fasilitasi Pengawasan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rismunandar, SE**
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan
Selaku Atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut adalah tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

RISMUNANDAR, SE
NIP. 196212171986031009

Padang, 26 April 2019
Pihak Pertama,

ERIZAL HASAN, SE
NIP. 196202221984111001

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Tahun : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Fasilitasi Pengawasan	1 Jumlah kegiatan pengawasan yang difasilitasi	120 Dokumen
		2 Jumlah rekomendasi pengawasan	120 Dokumen
2	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Persentase berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	6.325.268.287	
	Jumlah	6.325.268.287	

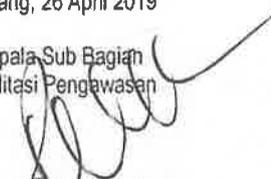
Mengetahui,

Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran
 dan Pengawasan


RISMUNANDAR, SE
 Pembina - IV/a
 NIP. 196212171986031009

Padang, 26 April 2019

Kepala Sub Bagian
 Fasilitasi Pengawasan


ERIZAL HASAN, SE
 Penata Tk. I - III/d
 NIP. 196202221984111001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nasrizal Rivai, SE, M.Si**
Jabatan : Ka.Subbag. Fasilitasi Penganggaran
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rismunandar, SE**
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
Selaku Atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut adalah tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

RISMUNANDAR, SE
NIP. 196212171986031009

Padang, 26 April 2019

Pihak Pertama,

NASRIZAL RIVAI, SE, M.Si
NIP. 19720418 2005011008

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Tahun : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Fasilitasi Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang difasilitasi	- 4 Kegiatan - 1 Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1			Kegiatan baru diusulkan pada Anggaran Perubahan 2019

Mengetahui :
 Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan


RISMUNANDAR, SE
 Pembina - IV/a
 NIP. 19621217 198603 1 009

Kepala Sub Bagian
 Fasilitasi Penganggaran


NASRIZAL RIVAI, SE, M.Si
 Penata Tk. I - III/d
 NIP. 19720418 200501 1008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ismelda Jenreini, S.STP, MM**
Jabatan : **Plt. Ka.Subbag. Kerjasama dan Aspirasi**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rismunandar, SE**
Jabatan : **Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**
Selaku Atasan Langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut adalah tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

RISMUNANDAR, SE
NIP. 196212171986031009

Padang, 03 Juni 2019

Pihak Pertama,

ISMELDA JENREINI, S.STP, MM
NIP. 198401232003122002

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Tahun : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Kerjasama dan Aspirasi Masyarakat	1 Persentase Aspirasi Masyarakat yang tertampung dan terjaring	100%
		2 Persentase Kerjasama yang terlaksana	100%
2	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Persentase berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Reses	5.313.180.000	--
	Jumlah	5.313.180.000	

Mengetahui,

Kepala Bagian Keuangan,



RISMUNANDAR, SE
 Pembina - IV/a
 NIP. 196212171986031009

Padang, 03 Juni 2019

Plt. Kepala Sub Bagian
 Kerjasama dan Aspirasi



ISMELDA JENREINI, S.STP, MM.
 Penata Tk. I - III/d
 NIP. 198401232003122002

LAMPIRAN
Penghargaan

Penghargaan Kategori Khusus

Kepada :

H. RAFLIS, SH., MM



Tokoh Peduli Penyiaran Sumatera Barat 2019

Atas Perhatian, Dukungan dan Kepedulian yang tinggi terhadap ekstatonal (KPID) dan Dunia Penyiaran di Sumatera Barat

*Disorahkan pada Malam Anugerah KPID Sumbang 2019
Hotel Grand Inna Padang
Selasa, 17 Desember 2019*

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
SUMATERA BARAT**

Ketua



Arlendi Sukumbang, SH., MH

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Se - Sumatera Barat Tahun 2019

Kategori : Organisasi Perangkat Daerah

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Sebagai Badan Publik

MENUJU INFORMATIF

Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Padang, 6 Desember 2019

komisi informasi sumatera barat



Adrian Tuswandi, S.H



KOMISI INFORMASI
SUMATERA BARAT



HAK ANDA UNTUK TAHU